



# KINERJA BPOM

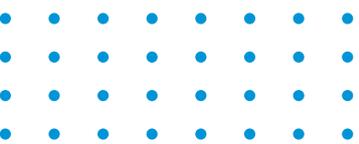
Dalam Angka Triwulan I Tahun 2025





# KINERJA BPOM DALAM ANGKA

## TRIWULAN I TAHUN 2025



# SAMBUTAN KEPALA BPOM RI



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 44.909 NIE, pemeriksaan terhadap 3.832 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 5.552 sampel, 36 perkara, dan 70 kegiatan pelaksanaan KIE.

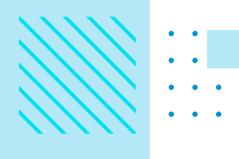
Di tengah dinamika global dan tantangan pengawasan yang semakin kompleks, termasuk isu-isu krusial seperti maraknya peredaran obat ilegal dan pangan yang tidak aman, BPOM semakin memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum. Kasus-kasus besar seperti peredaran obat-obatan yang mengandung zat berbahaya dan skandal impor pangan ilegal menunjukkan betapa pentingnya peran BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat. Dengan inovasi teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, BPOM berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. BPOM juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendukung pelaku usaha, termasuk UMKM, agar dapat menghasilkan produk yang aman dan berdaya saing.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 30 Juni 2025  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

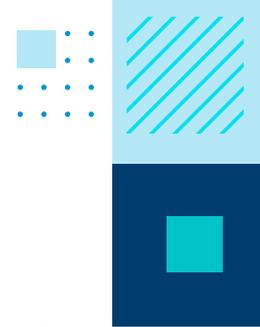


TARUNA IKRAR



# Daftar Isi

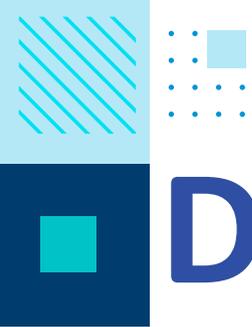
SAMBUTAN KEPALA BPOM RI .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
HIGHLIGHT .....	1
BAB 1 Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan .....	5
BAB 2 Penindakan di Bidang Obat dan Makanan.....	11
BAB 3 Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman.....	15
BAB 4 Analisis Kebijakan Obat dan Makanan .....	19
BAB 5 Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan .....	21
BAB 6 Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat .....	23
BAB 7 Digitalisasi Pelayanan Publik.....	33
BAB 8 Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan .....	37
BAB 9 Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	39
BAB 10 Kerjasama Internasional .....	43
BAB 11 Sumber Daya Manusia .....	47
BAB 12 Realisasi Anggaran Sampai dengan Maret 2024 .....	49
BAB 13 Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM .....	51
Penutup .....	51
Lampiran .....	52



# Daftar Gambar

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan .....	5
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan .....	5
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan .....	6
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.....	6
Gambar 5.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan.....	8
Gambar 6.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan.....	8
Gambar 7.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan.....	9
Gambar 8.	Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan.....	11
Gambar 9.	Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan s.d. Triwulan I Tahun 2025 .....	12
Gambar 10.	Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2025.....	13
Gambar 11.	Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia s.d. Triwulan I Tahun 2025 ...	14
Gambar 12.	Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi Badan POM s.d. Triwulan 1 Tahun 2025.....	23
Gambar 13.	Jumlah Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan I tahun 2025 .....	23
Gambar 14.	Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d Triwulan I Tahun 2025 .....	24
Gambar 15.	Sebaran Media Pemberitaan Isu Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2025.....	24
Gambar 16.	Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform s.d Triwulan I Tahun 2025.....	25
Gambar 17.	Pertumbuhan Audiens Berdasarkan Platform s.d Triwulan I Tahun 2025 .....	25
Gambar 18.	Engagement Per Platform s.dTriwulan I Tahun 2025 .....	26
Gambar 19.	Top Engagement Content terkait Badan POM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube s.d Triwulan I Tahun 2025 .....	26
Gambar 20.	Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM) Vol.6/No.3/2024 .....	27
Gambar 21.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d Triwulan I Tahun 2025 .....	28
Gambar 22.	Jumlah Permintaan Informasi Publik s.d. Triwulan I Tahun 2025.....	29
Gambar 23.	Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi .....	30
Gambar 24.	Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM .....	30
Gambar 25.	Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi .....	31
Gambar 26.	Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM .....	31
Gambar 27.	Kepala Badan POM Menerima Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Kepala Badan Pangan Nasional di BCC .....	34
Gambar 28.	Hasil evaluasi RB BPOM Tahun 2024.....	40
Gambar 29.	Pelaksanaan <i>The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) Regulatory Innovations Workshop</i> di Singapura, 22 Januari 2025 .....	43
Gambar 30.	Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan BGN .....	45
Gambar 31.	Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan Kementerian Pertanian .....	46





# Daftar Tabel

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Target).....	7
Tabel 2. Profil Laporan Efek Samping.....	10
Tabel 3. Realisasi Anggaran s.d Maret 2025.....	49



# Highlight

## Kepala BPOM Taruna Ikrar Gandeng Polri Berantas Kejahatan Obat dan Makanan



Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama dengan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolda) Listyo Sigit Prabowo mengadakan pertemuan di Markas Besar Kepolisian RI, Jumat (10/1/2025). Pertemuan ini bertujuan membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan kedua belah pihak untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam upaya penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Dengan semakin diperkuatnya kerja sama antara BPOM dan Polri, diharapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berbahaya.

# Akselerasi Kemandirian Obat di Indonesia, BPOM Gelar Intensifikasi Asistensi Regulatori



Surabaya – BPOM menyelenggarakan asistensi regulatori secara intensif kepada para pelaku usaha di bidang obat selama 4 hari, Senin—Kamis (24—27/2/2025). Asistensi regulatori adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BPOM terhadap pelaku usaha agar mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Kegiatan dihadiri oleh 135 peserta secara luring, mencakup perwakilan industri farmasi, industri farmasi lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pedagang besar farmasi (PBF) di area Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, BPOM berupaya memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi serta mendorong kemandirian dalam produksi obat dan bahan obat dalam negeri.

# Kepala BPOM Sidak Pangan Takjil di Bendungan Hilir, Pastikan Produk Aman



Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar melakukan sidak ke sejumlah pedagang yang menjajakan pangan berbuka puasa (takjil) di Bazar Takjil Ramadan, Bendungan Hilir, Jakarta pada Selasa (11/3/2025). Hasil uji sampel yang dilakukan BPOM melalui Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta tidak mengandung bahan berbahaya sehingga produk pangan yang dijual aman dikonsumsi masyarakat. Kegiatan sidak hari ini merupakan rangkaian intensifikasi pengawasan pangan.



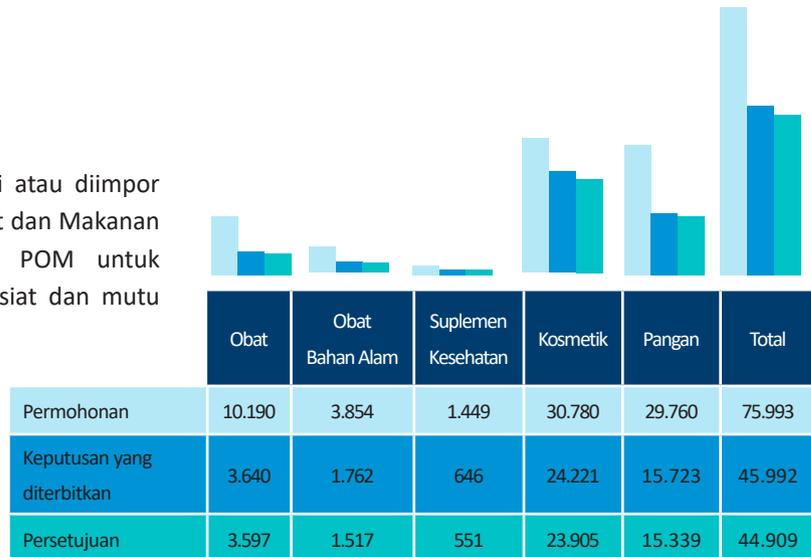
# BAB 1

## Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

### Pengawasan *Pre-market*

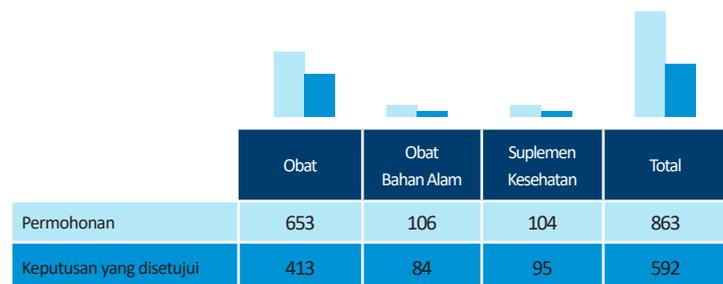
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, telah diterbitkan 45.992 keputusan dan 44.909 persetujuan izin edar dari 75.993 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari 863 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 592 (68,60%) iklan.



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

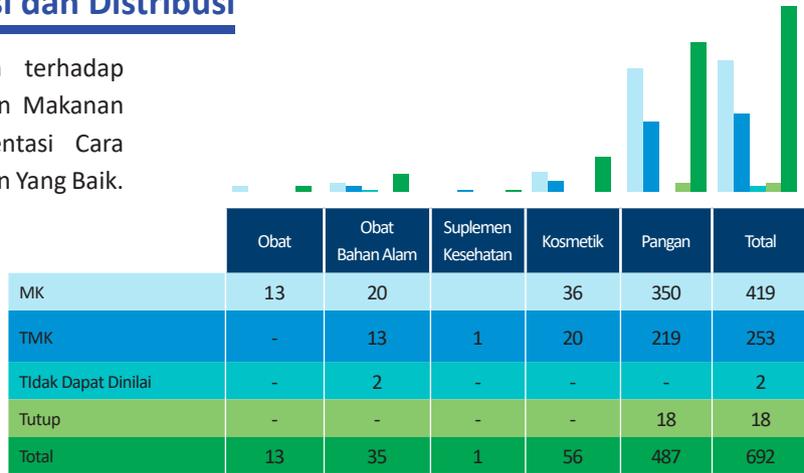
## Pengawasan *Post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

### Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

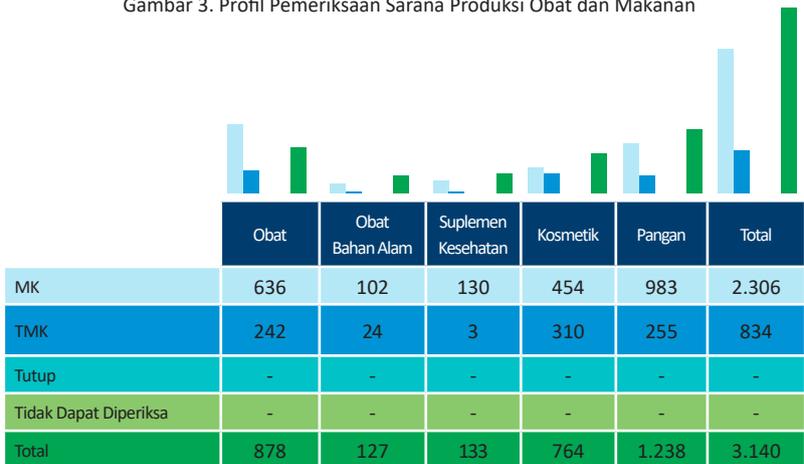
Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah diperiksa sebanyak 692 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 253 (37,56%) sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah diperiksa sebanyak 3.140 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan 834 (26,56 %) sarana adalah TMK.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

## Sampling dan Pengujian Laboratorium

### a. Targeted

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Target)

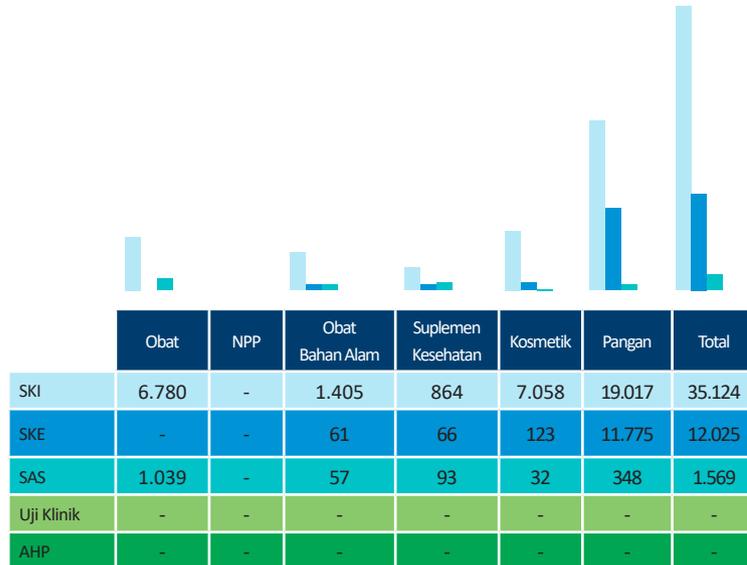
Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Tageted	1.131	-	-	1	31	1.130	936	904	32	33	194	937
Obat bahan alam	Tageted	986	18	-	2	185	966	908	653	255	275	58	928
Obat kuasi	Tageted	68	1	-	-	19	67	60	41	19	20	7	61
Suplemen Kesehatan	Tageted	264	2	-	-	29	262	249	212	37	39	13	251
Kosmetik	Tageted	1.781	-	-	-	-	1.781	1.587	1.422	165	165	194	1.587
Rokok	Tageted	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pangan	Tageted	2.291	1	-	-	423	2.290	1.787	1.533	254	255	503	1.788

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari 6.521 sampel yang disampling terdapat 5.552 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana terdapat 787 (14,17%) sampel tidak memenuhi syarat.



## Sertifikasi

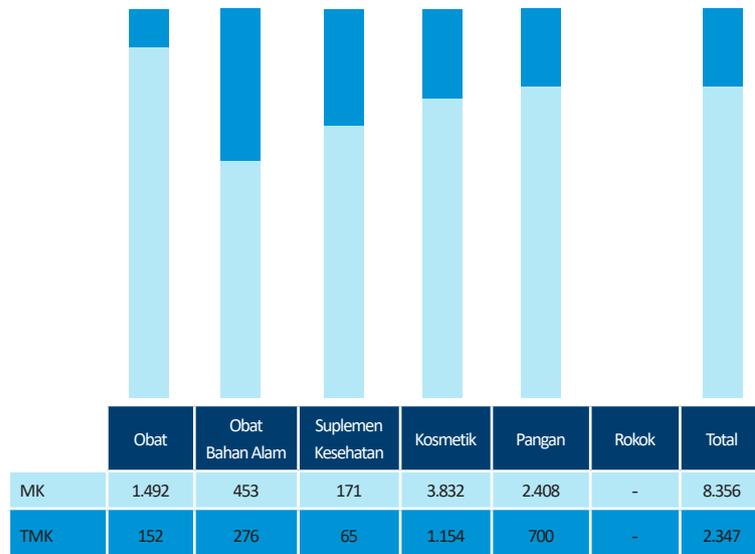
Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (Special Access Scheme), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah diterbitkan 35.124 SKI, 12.025 SKE, 1.569 SAS. Belum terdapat Uji Klinik dan AHP yang diterbitkan sampai dengan Triwulan I 2025.



Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

## Pengawasan Iklan

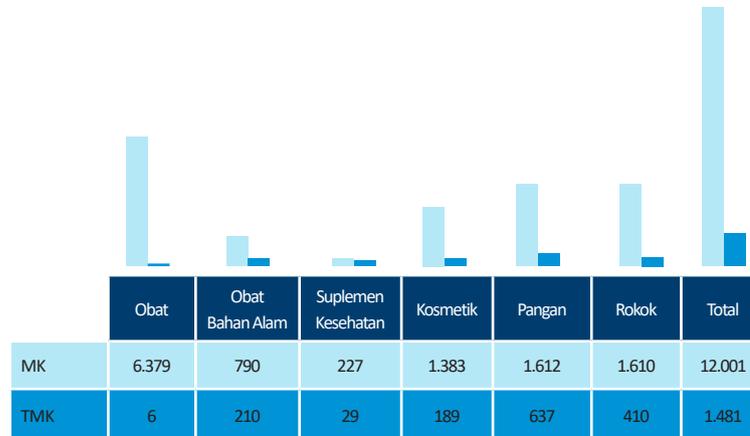
Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan leaflet/brosur. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari 10.703 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 2.347 (21,93%) iklan tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

## Pengawasan Label

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dari 13.482 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 1.481 (10,99)% label tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan



## Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Tabel 2. Profil Laporan Efek Samping

	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindaklanjuti	%
Obat	-	-	-
Obat Bahan Alam	9	9	100,00
Suplemen Kesehatan	28	28	100,00
Kosmetik	214	200	93,46



Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia:

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmokologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

# BAB 2

## Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

### 1. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, Badan POM menyusun aplikasi peta kerawanan kejahatan, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.



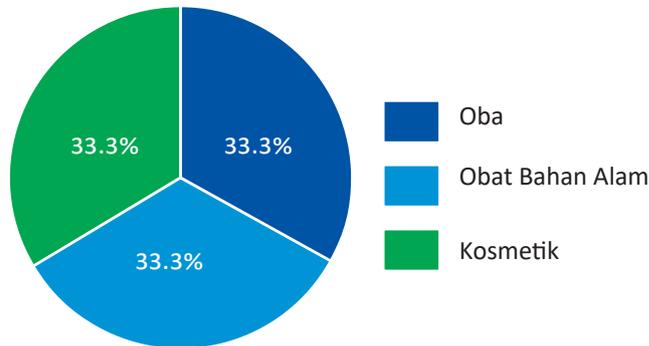
Gambar 8. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan data kerawanan kejahatan yang aktual sebanyak 1.515 kasus yang terdiri dari 698 kasus terkait obat, 222 kasus terkait obat bahan alam, 19 kasus terkait obat kuasi, 48 kasus suplemen kesehatan, 354 kasus terkait kosmetik dan 174 kasus terkait komoditi pangan olahan.



## 2. Hasil Kegiatan dan Operasi Intelijen

Peran Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis seiring dengan masih banyaknya temuan terkait Obat dan Makanan ilegal baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya Badan POM untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan/operasi intelijen guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik pada tahap *premarket* maupun *postmarket*. Kegiatan/operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan berbagai kasus komoditi di antaranya kasus obat, NAPPZA, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan pangan olahan baik yang berujung ditindaklanjuti dengan saksi administrasi maupun *projusticia*.

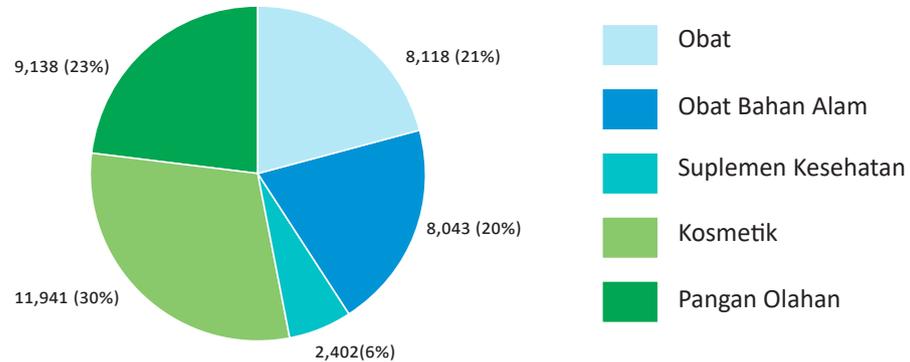


Gambar 9. Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan s.d. Triwulan I Tahun 2025

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, telah disusun 51 laporan informasi dari pelaksanaan kegiatan intelijen dan 7 laporan intelijen dari pelaksanaan operasi intelijen. Dari seluruh rangkaian kegiatan dan operasi intelijen tersebut telah dihasilkan 3 rekomendasi intelijen dengan 1 rekomendasi terkait kasus peredaran obat ilegal, 1 rekomendasi terkait kasus obat bahan alam ilegal, serta 1 rekomendasi kasus kosmetik ilegal yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit penerima rekomendasi.

### 3. Hasil Patroli Siber

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, Badan POM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2025

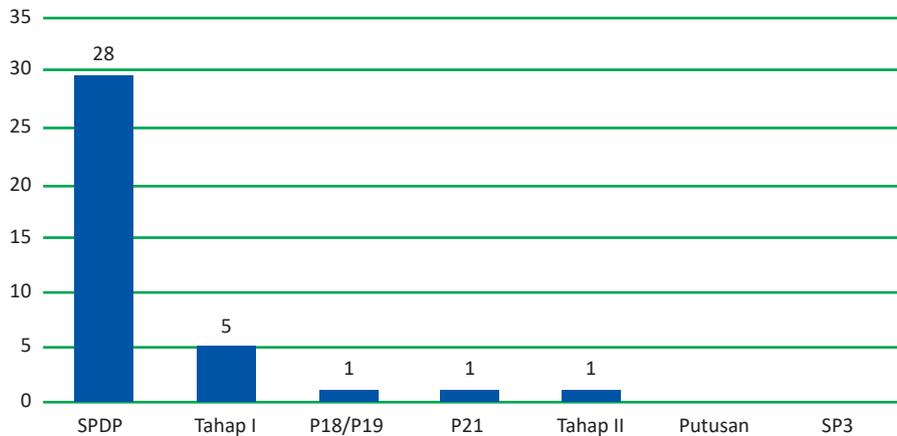
Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan triwulan I tahun 2025, ditemukan 39.642 *link* yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### 4. Hasil Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM telah menindaklanjuti 36 perkara. Sebanyak 28 perkara masih dalam tahap SPDP, 5 perkara pada tahap I, 1 perkara pada tahap P18/19, 1 perkara pada tahap P21, 1 perkara pada tahap II, dan belum terdapat perkara yang sudah sampai pada tahap putusan pengadilan maupun SP3. putusan pengadilan maupun SP3.



Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia s.d. Triwulan I Tahun 2025



# BAB 3

## Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun peraturan/standar/pedoman di bidang Obat dan Makanan.

### Obat

Pada tahun 2025, terdapat 8 peraturan/standar/pedoman terkait obat yang disusun oleh Badan POM. Daftar 8 peraturan/standar/pedoman terkait obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Produk Biosimilar (15%).
2. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Registrasi Obat (45%).
3. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans (45%).
4. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 tentang Promosi Obat (15%).
5. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (15%).
6. Peraturan Badan POM Tentang Standar Cara Pembuatan yang Baik untuk Eksipien yang digunakan dalam Pembuatan Obat (45%).
7. Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Rekognisi Laboratorium Eksternal Pengujian Obat dan Bahan Obat (55%).
8. Peraturan Badan POM tentang Sampling dan Pengujian Berbasis Risiko Substansi Obat (0%).



## Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Terdapat 7 peraturan/standar/pedoman terkait obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disusun oleh Badan POM pada tahun 2025. Daftar 7 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam (25%).
2. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam (25%).
3. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2022 dan Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (25%).
4. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Registrasi Obat Kuasi (25%).
5. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik (25%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Makanan melalui Peran Serta Masyarakat (90%).
7. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.08.11.07.331 Tahun 2011 tentang Metode Analisa Kosmetik (10%).

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 telah diselesaikan 51 kajian dengan 51 kajian diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 85 hari kerja).

## Pangan

Terdapat 8 peraturan/standar/pedoman terkait pangan olahan yang disusun oleh Badan POM pada tahun 2025. Daftar 6 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Badan POM tentang Informasi Nilai Gizi Usaha Mikro dan Kecil (30%).
2. Pedoman Pengelolaan Air Hujan sebagai Bahan Baku Air Minum/Pedoman Persyaratan Mutu dan Keamanan Air Hujan sebagai Bahan Baku Air Minum (8%).
3. Revisi Peraturan Badan POM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (55%).

4. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus - Kelompok Dewasa (27%).
5. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (33%).
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Badan POM 2025: Revisi Lampiran Peraturan Cemaran (27%).

Badan POM juga menyusun rekomendasi kebijakan terkait pangan olahan. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 telah diselesaikan 40 rekomendasi kebijakan dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu.





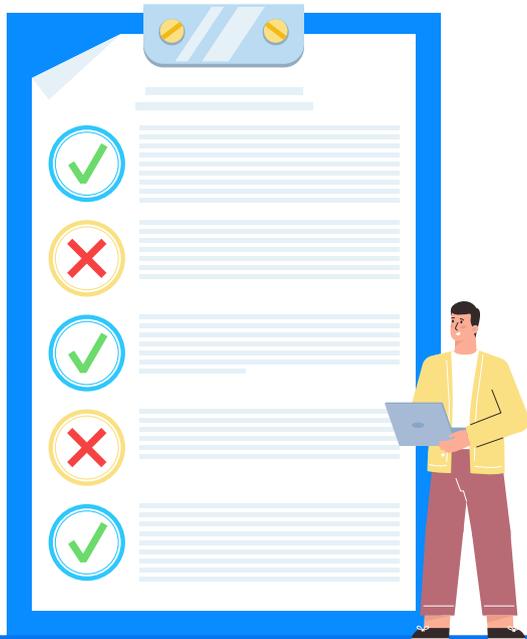
# BAB 4

## Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Analisis kebijakan Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2025 terdapat 5 topik riset dan kajian yang dilaksanakan oleh Badan POM. Daftar riset dan kajian beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Tahun 2025 (10%).
2. Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2025 (10%).
3. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 (12%).
4. Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC Tahun 2025 (5%).
5. Penyusunan Desain dan Metodologi Survei Profil Produk Beredar Tahun 2026 dan Evaluasi Pedoman Sampling 2025 (10%).





# BAB 5

## Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

### a. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium

Badan POM terus mendorong peningkatan kualitas laboratorium melalui pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). SKL adalah standar yang ditetapkan Badan POM sebagai acuan penilaian atau pengukuran kemampuan laboratorium Badan POM dalam pelaksanaan pengujian, pengembangan pengujian, pengembangan baku pembanding dan standar kompetensi.

Hingga triwulan I 2025, tingkat pemenuhan SKL mencapai 64,1%. Capaian ini merupakan agregat dari seluruh laboratorium yang ada di Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan SKL antara lain penyusunan *tools* penilaian SKL, monev pemenuhan SKL, dan bimbingan teknis peningkatan kompetensi pengujian mikrobiologi.

### b. Metode Analisis yang Dikembangkan

Badan POM terus mengembangkan metode analisis Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar sesuai dengan persyaratan terkini. Pengembangan metode analisis dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 telah dikembangkan 21 metode analisis.

### c. Baku Pembanding yang Dikembangkan

Pengembangan baku pembanding dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 telah dikembangkan 6 baku pembanding.

### d. Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian



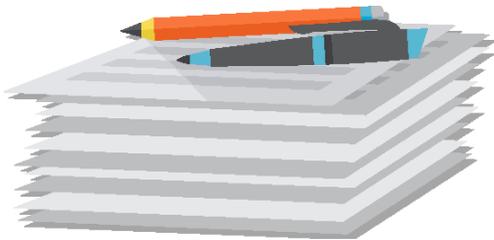
Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel *lot release* vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, terdapat 168 sampel yang telah selesai uji dan memenuhi ketentuan *timeline*.

**e. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang Dikalibrasi Sesuai Standar**

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, telah dilakukan kalibrasi terhadap 824 peralatan laboratorium Obat dan Makanan.

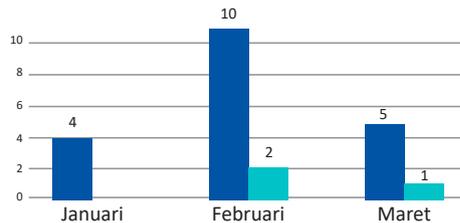
**f. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan**

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, *workshop*, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan Badan POM maupun eksternal sesuai lingkup pengujian/keahlian. Pada tahun 2025, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 42 jejaring laboratorium dengan pelaksanaan dimulai pada triwulan II.



# BAB 6

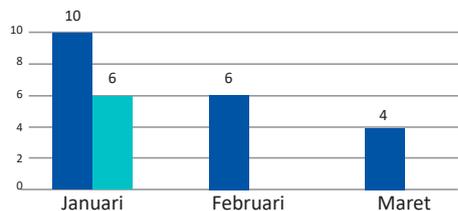
## Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat



Gambar 12. Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi Badan POM s.d. Triwulan I Tahun 2025

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, Badan POM telah menerbitkan 19 siaran pers dan 3 penjelasan/klarifikasi terkait isu Obat dan Makanan. Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas antara lain obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi dipublikasikan melalui *website* dan media sosial Badan POM.

■ Siaran Pers    ■ Penjelasan/Klarifikasi

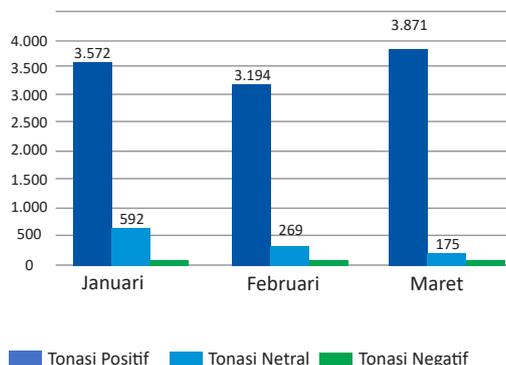


Gambar 13. Jumlah Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan I tahun 2025

Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara, *talkshow* dan pemberian jawaban tertulis. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, Badan POM menerima 30 permohonan wawancara dari media. Sebanyak 26 permohonan sudah ditindaklanjuti dengan rincian 20 wawancara langsung dan 6 jawaban tertulis.

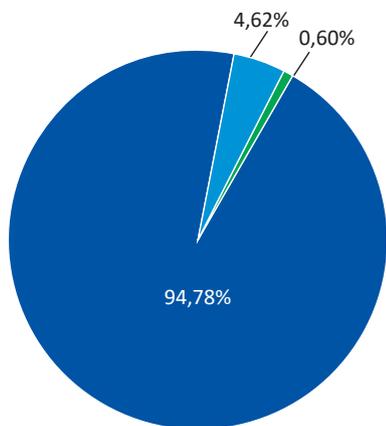
■ Wawancara Langsung    ■ Jawaban Tertulis    ■ Talkshow





Gambar 14. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d Triwulan I Tahun 2025

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, terdapat 11.673 pemberitaan terkait Obat dan Makanan secara umum maupun Badan POM. Dari seluruh pemberitaan tersebut, sejumlah 91,12% bertonasi positif (10.637 berita), 8,88% bertonasi netral (1.036 berita), dan tidak terdapat berita bertonasi negatif. Tonasi berita positif muncul dari berbagai kegiatan Badan POM serta banyaknya pernyataan Badan POM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik Obat dan Makanan yang tidak mengutip Badan POM.



Gambar 15. Sebaran Media Pemberitaan Isu Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2025

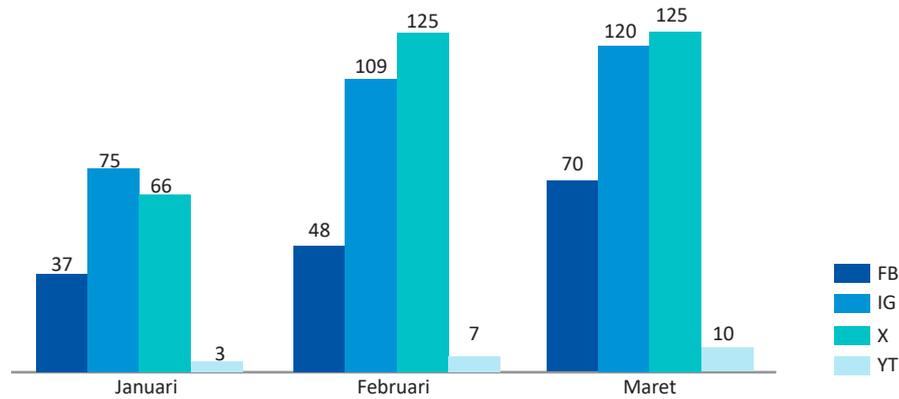
Tingginya pemberitaan positif pada Januari 2025 karena Badan POM dan Polri memperkuat sinergisitas dalam penindakan mafia di bidang makanan, minuman, obat-obatan hingga kosmetik. Pada bulan yang sama, Badan POM juga berkolaborasi dengan berbagai pihak sebagai komitmen dan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Pada Februari 2025 Badan POM mengumumkan hasil intensifikasi pengawasan kosmetik ilegal, dan Maret 2025 merupakan periode di mana Badan POM melalui unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia melakukan intensifikasi pengawasan Ramadan dan jelang Idulfitri 1446 H.



Berdasarkan jenis media, pemberitaan terkait Obat dan Makanan serta Badan POM hampir seluruhnya berasal dari media *online* sebesar 94,78% (11.064 berita), sedangkan media cetak sebesar 4,62% (539 berita) dan media elektronik sebesar 0,60% (70 berita).

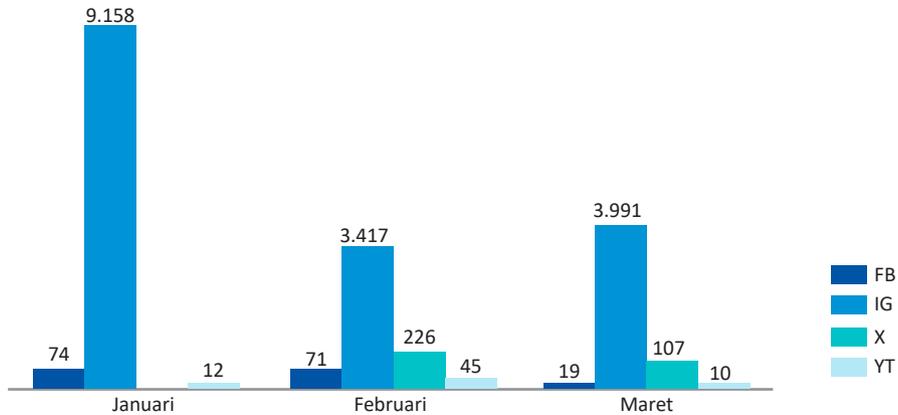
Pada triwulan I tahun 2025, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 *platform* media sosial yaitu Facebook, Instagram, X atau Twitter, dan Youtube memiliki rata-rata 1-2 unggahan per hari. *Platform* X atau Twitter merupakan *platform* dengan aktivitas tertinggi yaitu sebanyak 316 *tweets* dibandingkan dengan 3 *platform* media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah Instagram dengan 304 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 155 unggahan, serta Youtube sebanyak 19 unggahan.

Secara garis besar, total unggahan selama triwulan I pada berbagai *platform* adalah 794 konten, dengan rincian 181 unggahan di bulan Januari, 288 unggahan di bulan Februari, dan 325 unggahan di bulan Maret. Rincian jumlah unggahan sampai dengan triwulan I di berbagai *platform* sebagai berikut:



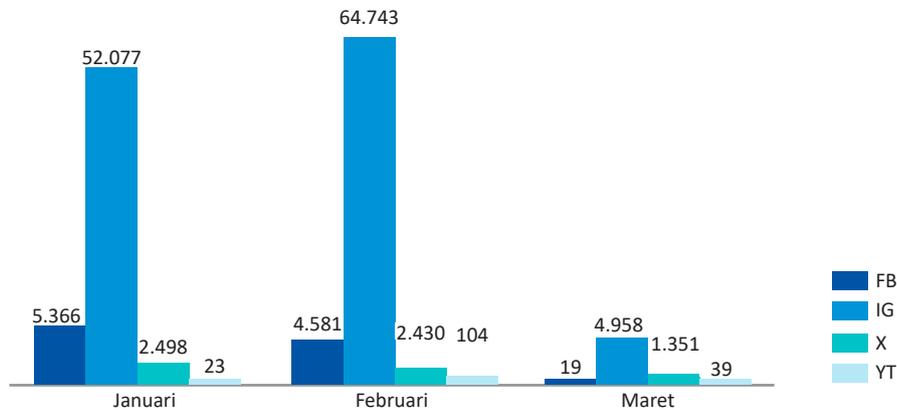
Gambar 16. Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan *Platform* s.d Triwulan I Tahun 2025

Sementara itu, pertumbuhan audiens/khalayak/pengunjung pada triwulan I terhadap 4 *platform* media sosial terpantau fluktuatif. Instagram merupakan *platform* dengan total audiens tertinggi pada triwulan I ini dengan jumlah 16.566 audiens, sementara di peringkat kedua *platform* X atau Twitter dengan jumlah 333 audiens, dilanjutkan dengan Facebook dengan jumlah 164 audiens, dan Youtube dengan 67 audiens. Pertumbuhan audiens tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 9.244 audiens, disusul bulan Maret sebanyak 4.127 audiens dan bulan Februari sebanyak 3.759 audiens.



Gambar 17. Pertumbuhan Audiens Berdasarkan Platform s.d Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I, *engagement* pada setiap *platform* cenderung fluktuatif. *Engagement* tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan jumlah 71.858, diikuti bulan Maret sejumlah 65.517, dan bulan Januari sebesar 59.694. Pertumbuhan jumlah *engagement* sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:



Gambar 18. Engagement Per Platform s.d Triwulan I Tahun 2025

Top engagement content terkait Badan POM di keempat platform pada triwulan I dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 19. Top Engagement Content terkait Badan POM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube s.d Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, Badan POM telah menerbitkan Majalah POM (MaPOM) Vol.6/No.3/2024 dengan mengusung tema utama Wajah Baru Pengawasan Obat dan Makanan. Tema ini dipilih untuk merangkum arah baru pengawasan obat dan makanan di bawah kepemimpinan Kepala BPOM Taruna Ikrar. Fokus BPOM adalah terus melaju untuk memantapkan kredibilitas di kancah global. Salah satu tonggak penting yang tengah diupayakan adalah meraih akreditasi WHO *Listed Authority* (WLA) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

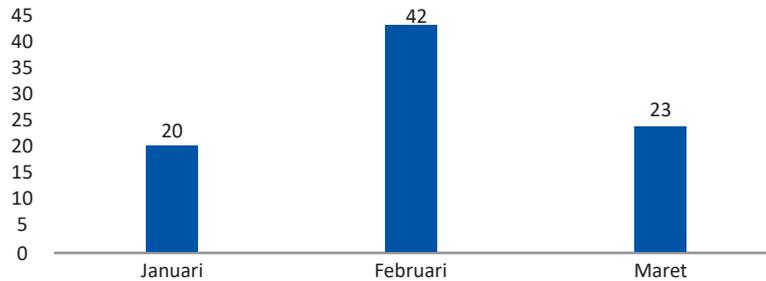


Gambar 20. Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM) Vol.6/No.3/2024



Gambar 21. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d Triwulan I Tahun 2025

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan POM telah menerima 85 permintaan informasi dari pemohon informasi publik. Profil pemohon informasi berdasarkan profesi yaitu pelajar/mahasiswa (85,88%), PNS/TNI/POLRI (9,41%), masyarakat umum lainnya (2,35%), karyawan (1,18%), dan pelaku usaha (1,18%).

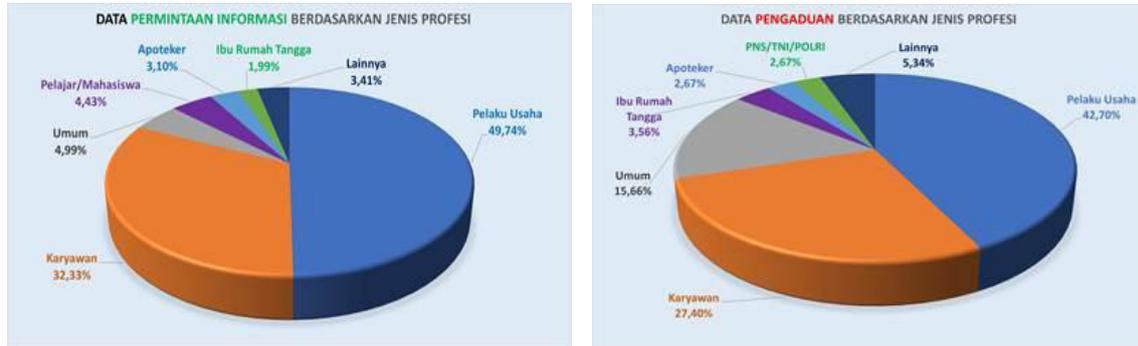


Gambar 22. Jumlah Permintaan Informasi Publik s.d. Triwulan I Tahun 2025

Dari 85 permintaan informasi publik yang diterima oleh Badan POM, sebanyak 75 (88,24%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 6 (7,06%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 4 (4,71%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian dan ditolak karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klafisikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian yaitu tidak lebih dari 17 hari kerja dengan rata-rata waktu penyelesaian adalah 3,76 hari kerja.

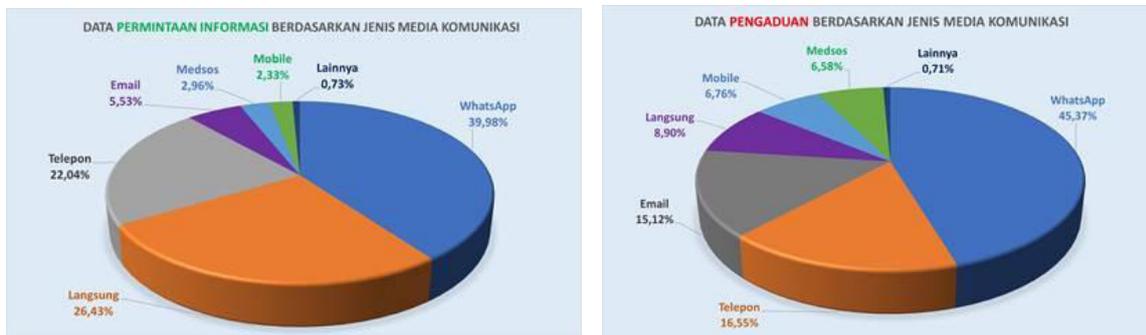
Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat Obat dan Makanan sampai dengan triwulan I tahun 2025, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 76 UPT di seluruh Indonesia serta *Contact Center* HALOBPOM sebanyak 13.947 layanan, terdiri dari 13.385 (95,97%) layanan permintaan informasi dan 562 (4,03%) layanan pengaduan.





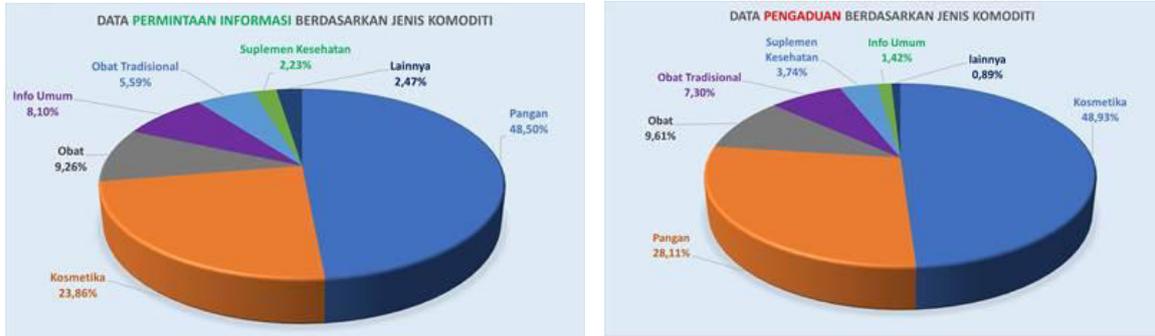
Gambar 23. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 6.658 (49,74%) layanan dan karyawan sebanyak 4.328 (32,33%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 240 (42,70%) layanan dan karyawan sebanyak 154 (27,40%) layanan



Gambar 24. Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui aplikasi *WhatsApp* sebanyak 5.351 (39,98%) layanan dan datang langsung (tatap muka) sebanyak 3.538 (26,43%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui *WhatsApp* sebanyak 255 (45,37%) layanan dan telepon sebanyak 93 (16,55%) layanan.



Gambar 25. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 6.492 (48,50%) layanan dan kosmetika sebanyak 3.193 (23,86%). Adapun komoditi yang banyak diadukan yaitu pangan sebanyak 275 (48,93%) layanan dan kosmetika sebanyak 158 (28,11%) layanan.



Gambar 26. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 5.756 (43,01%) layanan dan sertifikasi sebanyak 3.471 (25,93%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi tentang informasi magang/penelitian oleh mahasiswa, penerimaan ASN di BPOM, informasi prosedur kunjungan, informasi nomor kontak unit teknis di Badan POM, pengujian laboratorium, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, informasi legalitas produk, konsultasi desain kemasan produk, Informasi Nilai Gizi, dan tanggal



kedaluwarsa. Adapun topik pengaduan yang banyak diajukan yaitu tentang inspeksi produk sebanyak 220 (39,15%) layanan dan proses pendaftaran seperti *timeline* pendaftaran produk, prosedur pengajuan variasi, dan konfirmasi penyampaian perbaikan sebesar 121 (21,53%) layanan.



# BAB 7

## Digitalisasi Pelayanan Publik

### a. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan POM

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Badan POM merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE dilakukan setiap tahun baik melalui audit secara langsung oleh Kementerian PAN dan RB maupun *self assessment* oleh Badan POM sendiri. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE mengacu pada peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang mencakup 47 indikator yang harus dipenuhi oleh Badan POM. Pada tahun 2024 Indeks SPBE yang diperoleh Badan POM adalah 4,53 dengan kriteria memuaskan. Nilai ini meningkat 0,45 dari Indeks SPBE pada tahun 2023 yaitu 4,08.

Capaian indeks SPBE ini tidak lepas dari komitmen Badan POM dalam menerapkan SPBE dan melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal guna mendukung terlaksananya implementasi SPBE. Oleh karena itu setiap tahun dilakukan reviu tim dan penyusunan Surat Keputusan (SK) Tim SPBE yang terdiri dari SK Tim Asesor SPBE, SK Tim Koordinasi SPBE, dan SK Tim Teknis Reviu Arsitektur SPBE.

### b. BPOM Mobile

BPOM *Mobile* merupakan bentuk inovasi dalam strategi komunikasi Badan POM yang akan bermanfaat dalam menunjang peran dan fungsi Badan POM, masyarakat dan *stakeholder* dalam kebersamaan membangun kehidupan bangsa. BPOM *Mobile* juga merupakan salah satu bentuk dukungan implementasi digitalisasi atau *e-government* yang bermanfaat dalam peningkatan aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Badan POM. Berdasarkan data aktivitas BPOM Mobile dari tahun 2018 hingga triwulan I 2025, aplikasi ini telah diunduh oleh 2.612.220 pengguna, dengan total aktivitas pemindaian atau pemakaian fitur scan 2D *Barcode* mencapai 24.952.826 kali, serta menerima 12.133 laporan pengaduan atau permintaan informasi dari masyarakat.



BPOM Mobile telah memperbarui aplikasi dengan menambahkan beberapa menu baru, yaitu Info Alur Registrasi Produk, Info BPOM di Indonesia, PPID BPOM, dan JDIH BPOM. Selain penambahan menu baru, terdapat pembaruan fitur notifikasi, penambahan survei setelah mengakses *e-labeling*, dan pengaduan efek samping untuk akun tenaga kesehatan. Versi terbaru BPOM Mobile telah tersedia di Play Store dan App Store sejak 28 Desember 2024.

### c. Layanan Data Terbuka

Layanan data terbuka merupakan kegiatan penyajian data dan informasi. Salah satunya adalah Badan POM *Command Center* (BCC). BCC menyajikan visualisasi data dan informasi untuk kebutuhan pimpinan dalam mendukung pembuatan kebijakan dengan memberikan kemudahan melakukan monitoring dan evaluasi pada seluruh proses bisnis di Badan POM secara komprehensif dan *real time* dalam bentuk *dashboard*. Data dan informasi yang disajikan berasal dari unit kerja di BPOM yang kemudian diolah dan divisualisasi sesuai kebutuhan organisasi.



Gambar 27. Kepala Badan POM Menerima Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Kepala Badan Pangan Nasional di BCC

Pada triwulan 1 tahun 2025, BCC menerima beberapa kunjungan antara lain dari kementerian/instansi lain ataupun lembaga pendidikan:

- a. Kunjungan Kantor Kepresidenan ke BCC pada tanggal 13 Februari 2025
- b. Kunjungan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Kepala Badan Pangan Nasional dalam rangka pembahasan sinkronisasi dan kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas di sektor pangan pada tanggal 4 Maret 2025
- c. Kunjungan Mahasiswa Magang Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tanggal 7 Maret 2025

Selain itu, untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi pada kegiatan ini, maka diperlukan koordinasi untuk memastikan validitas data dan informasi yang ditampilkan di dashboard BCC. Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025 terkait Pembuatan *Dashboard Pre-Market* Badan POM yang mengundang unit registrasi di Badan POM. Pada rapat koordinasi tersebut dibahas tentang struktur dan kebutuhan *dashboard*, standar dan integrasi data, serta kendala dan tantangan pada *dashboard* tersebut.

#### d. Penyelenggaraan Pendaftaran Sistem Elektronik

Dalam rangka melaksanakan amanat SPBE salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran baru adalah pelaksanaan *Clearance* EGA SPBE yang dilaksanakan oleh setiap instansi sebelum melakukan pekerjaan atau pengadaan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada proses *clearance* EGA SPBE tahun 2025 ditetapkan persyaratan tambahan bahwa seluruh sistem elektronik yang diajukan wajib didaftarkan pada layanan Pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Proses pendaftaran ini wajib dilakukan oleh setiap pengelola sistem elektronik, oleh karena itu perlu dilakukan pendaftaran pejabat dan sub pejabat untuk mendapatkan akses pada <https://pse.layanan.go.id/login>. Pendaftaran sub pejabat sistem elektronik BPOM dilaksanakan melalui 2 tahap dengan total 26 unit kerja.

#### e. Pemenuhan Standarisasi Sistem Informasi

Standar Sistem Informasi (SSI) merupakan pedoman utama bagi seluruh unit kerja dan pengembang sistem di lingkungan Badan POM. Standar ini mengatur seluruh proses pembangunan sistem, dari pengajuan awal hingga pemeliharaan pasca-implementasi. Dasar hukum pedoman adalah Keputusan Kepala Badan POM Nomor 445 tahun 2023 dan Surat Edaran Nomor 5 tahun 2024.

Pada triwulan I tahun 2025, terdapat 12 usulan pengembangan aplikasi yang sudah diterima oleh Pusdatin. Seluruh inisiasi proyek pengembangan aplikasi yang diterima akan dilakukan analisis dan kajian kesesuaian antara spesifikasi pengembangan yang diajukan dengan Peta Rencana Badan POM. Hal ini untuk memastikan bahwa pengembangan aplikasi BPOM telah sejalan dengan Peta Rencana SPBE yang disusun untuk dapat menghasilkan layanan yang terpadu.

#### f. Pelaksanaan *Vulnerability Assessment* (VA)

*Vulnerability Assessment* (VA) atau uji kerentanan adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan



mengevaluasi kelemahan (*vulnerability*) dalam sistem, aplikasi, jaringan atau infrastruktur teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk merusak, mencuri atau mengganggu sistem. Dasar pelaksanaan uji kerentanan yaitu Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber.

Tujuan melakukan uji kerentanan sebagai langkah awal menjaga aset sistem informasi dan memberikan peringatan keamanan siber. Selama triwulan I 2025, telah dilaksanakan uji kerentanan terhadap 2 aplikasi internal Badan POM yaitu aplikasi Sang Integritas dan aplikasi KIE. Dari hasil uji terdapat total 7 temuan yang mencakup kategori *high*, *medium*, dan *low*.

# BAB 8

## Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

### 1. Penyusunan Regulasi

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, telah ditetapkan 4 Peraturan Badan POM, 13 Keputusan/Surat Edaran Kepala Badan POM, dan 17 Rumusan Perjanjian.

Judul Peraturan Badan POM

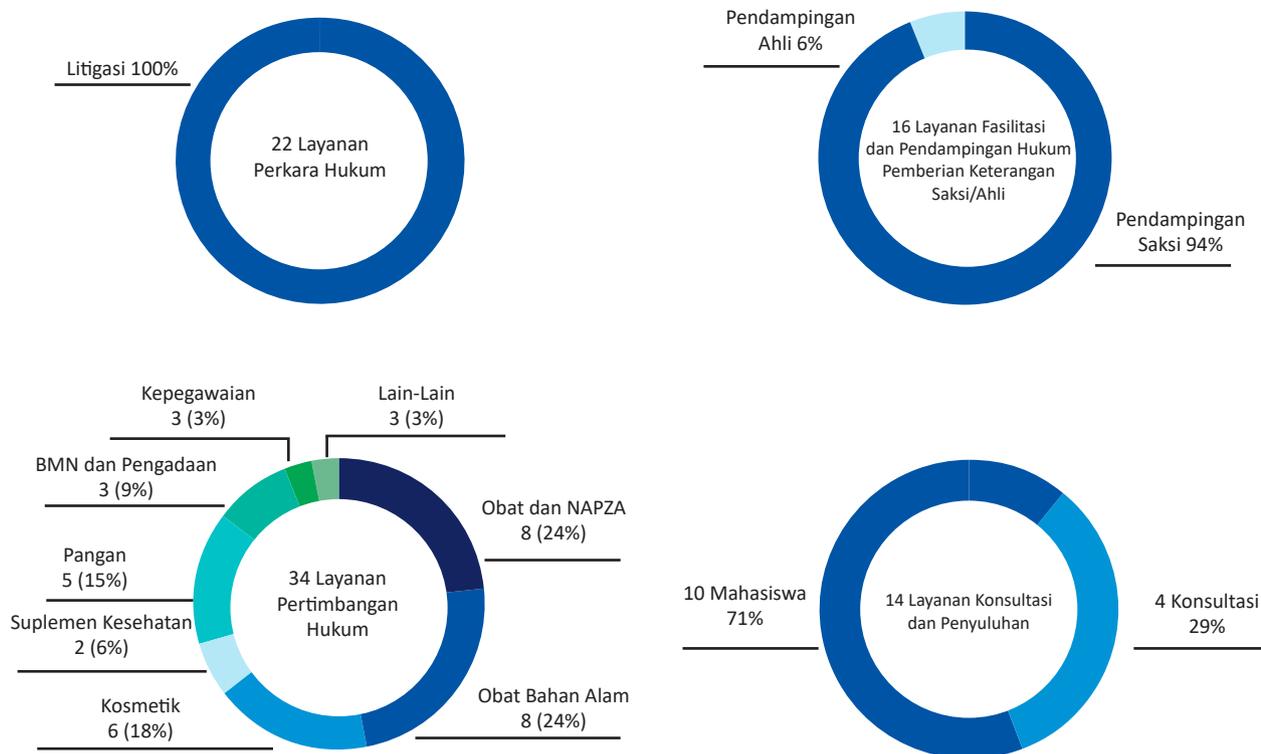
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Batch/Lot Vaksin
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi *Advanced*



## 2. Layanan Advokasi Hukum

Setiap instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Salah satu aspek hukum adalah layanan advokasi hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. Jumlah dan jenis layanan advokasi hukum yang sudah dilakukan oleh Badan POM sampai dengan triwulan I tahun 2025 yaitu 115 layanan yang terdiri dari:



Gambar 31. Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan I Tahun 2024

# BAB 9

## Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

### a. Penataan dan Penguatan Organisasi

Badan POM melakukan penataan organisasi untuk terciptanya organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Penataan organisasi merupakan proses evaluasi terhadap struktur organisasi eksisting pada organisasi induk dan UPT. Berdasarkan hasil penataan UPT Badan POM, Badan POM telah memperoleh tertulis Izin Prinsip Menteri PAN RB terhadap peningkatan klasifikasi 2 Balai menjadi Balai Besar POM, peningkatan 11 Loka POM menjadi Balai POM, dan pengubahan lokasi 2 UPT BPOM. Sebagai tindak lanjut, Badan POM telah melakukan penetapan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT Badan POM.

Sebagai upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah serta tindak lanjut dari penetapan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025, Kepala Badan POM mengukuhkan 2 Balai Besar POM dan 11 Balai POM pada tanggal 20 Maret 2025. Pengukuhan UPT Badan POM dihadiri secara luring oleh Gubernur NTT serta secara daring oleh 12 Bupati/Walikota yang dikukuhkan. Dengan demikian, saat ini terdapat 23 Balai Besar POM, 30 Balai POM, dan 23 Loka POM atau total 76 UPT BPOM di 37 provinsi.

### b. Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang telah dilaksanakan tahun 2024, Indeks sementara RB Badan POM tahun 2024 mengalami kenaikan dari 89,50 menjadi 96,24 dengan kategori "A" (Memuaskan). Tindak lanjut dari perolehan indeks sementara RB Badan POM yang meningkat setiap tahun, Badan POM telah melakukan koordinasi dengan unit kerja pengampu indikator RB General/Tematik terkait hasil sementara yang dilakukan oleh Kemen PANRB, dan saat ini seluruh unit telah menerima hasil penilaian tersebut tanpa sanggah.



Sehubungan dengan pelaksanaan RB tahun 2025, Badan POM berkomitmen melaksanakan tugas melalui penerapan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan RB, sampai dengan triwulan I beberapa K/L melakukan *benchmark* praktik terbaik pengelolaan RB Badan POM antara lain:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Zulfan Syarif beserta tim yang berkunjung ke Badan POM pada tanggal 6 Maret 2025.
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diwakili oleh Kepala Biro Organisasi dan SDM beserta tim yang mengundang Badan POM sebagai narasumber pada tanggal 7 Maret 2025.
3. Badan Gizi Nasional yang diwakili oleh Kepala Biro Manajemen Kinerja beserta tim yang mengundang Badan POM sebagai narasumber pada tanggal 13 Maret 2025.

SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB	
Selamat datang, bpom.i15.3 Badan Pengawas Obat dan Makanan	
Hasil Evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan	
RB General Awal	86.79
Koefisien	1.74
RB General	88.53
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	88.53
RB Tematik	7.71
Index RB	96.24
File Berkas	

Gambar 28. Hasil evaluasi RB BPOM Tahun 2024

### c. Tinjau Ulang Manual Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi

Badan POM telah mengintegrasikan sistem manajemen dengan mengacu pada berbagai standar dan persyaratan nasional maupun internasional seperti SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SNI ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi serta sistem manajemen lainnya ke dalam Manual Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi. Dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penerapan sistem manajemen, BPOM secara berkala melakukan pemeliharaan dan tinjau ulang Manual Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

Tinjau ulang dilakukan terhadap klausul-klausul sistem manajemen, peta proses bisnis, peta subproses bisnis, peta hubungan proses bisnis, peta lintas fungsi, dan daftar dokumen induk SOP makro yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi. Tinjau ulang melibatkan Tim Koordinator Manajemen Representatif, Tim Koordinator Auditor Internal dan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dukungan manajemen dalam pengawasan Obat dan Makanan. Tinjau ulang dilakukan dalam beberapa kali pembahasan yang intensif baik secara daring ataupun *hybrid* antara lain pada 9 Januari, 5 Februari, 11 Februari, 13 Februari dan 25 Februari.

#### d. Tinjau Ulang Dokumen SOP Makro BPOM

Sejalan dengan tinjau ulang Manual Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi, Badan POM juga melakukan tinjau ulang terhadap kumpulan dokumen SOP Makro Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam penerapan sistem manajemen pengawasan Obat dan Makanan.

Mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 133 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 421 Tahun 2024, BPOM memiliki 95 dokumen SOP Makro yang perlu ditinjau ulang. Titik berat tinjau ulang adalah perkuatan pengintegrasian standar persyaratan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan perkuatan manajemen risiko dalam pelaksanaan proses serta penyesuaian format dokumen SOP. Pembahasan dilakukan secara daring maupun *hybrid* dengan melibatkan Unit Koordinator dari dokumen SOP Makro, perwakilan Tim Koordinator Manajemen Representatif sesuai pembahasan dan perwakilan Unit Kerja Pusat dan UPT terkait.

Proses pembahasan mengacu pada prinsip-prinsip penyusunan dan tinjau ulang SOP dan merujuk pada prinsip SERA, yaitu penyederhanaan proses (Simplification-S), penghilangan proses yang tidak perlu (Elimination-E), pembuatan proses yang sama sekali baru (Reengineering-R), dan pengautomatisasian (Automation-A). Selama triwulan I 2025, setidaknya telah dilakukan 16 kali pembahasan tinjau ulang dokumen SOP Makro dan pengesahan 31 dokumen SOP Makro.

#### e. Pengembangan Pelayanan Publik

Sebagai salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), setiap UPP wajib melaksanakan SKM secara berkala minimal



1 kali dalam setahun. Pada tahun 2025, periode pelaksanaan SKM oleh UPP dijadwalkan pada bulan April sampai dengan Juli 2025. Pada triwulan I, telah dilaksanakan beberapa tahapan persiapan pelaksanaan SKM BPOM tahun 2025 yaitu:

**1. Pengumpulan data jumlah pengguna layanan per jenis layanan tahun 2024**

SKM Badan POM dilakukan terhadap seluruh jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh masing-masing UPP dengan mengacu pada daftar jenis layanan publik BPOM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BPOM. Sebagai tahap pertama dari persiapan pelaksanaan SKM, dilakukan pengumpulan data jumlah pengguna layanan per jenis layanan di masing-masing UPP. Pengumpulan data dilakukan melalui korespondensi yang dilanjutkan dengan *desk* dengan masing-masing UPP untuk validasi dan verifikasi.

**2. Penetapan target responden survei dan penyiapan tautan survei**

Selanjutnya, dilakukan penghitungan target responden survei per jenis layanan untuk masing-masing UPP berdasarkan formula Krejcie & Morgan sehingga didapat target minimal jumlah responden yang harus dipenuhi sesuai timeline pelaksanaan survei. Target per jenis layanan kemudian di-*input* di aplikasi SapaAPIP paralel dengan penyiapan tautan survei untuk masing-masing UPP.

**3. Penyampaian informasi dan arahan pelaksanaan SKM BPOM 2025 melalui Surat Sekretaris Utama**

Tahapan terakhir dari persiapan pelaksanaan SKM yaitu penyampaian informasi dan arahan pelaksanaan SKM BPOM Tahun 2025 melalui Surat Dinas Sekretaris Utama Nomor B-OT.03.04.2.03.25.173 tanggal 24 Maret 2025. Pada surat dinas tersebut disampaikan arahan dan informasi yang menjadi acuan bagi seluruh UPP di lingkungan BPOM dalam pelaksanaan SKM BPOM tahun 2025.

# BAB 10

## Kerjasama Internasional

### a. Partisipasi Badan POM dalam CEPI Regulatory Innovations Workshop

Badan POM berpartisipasi dalam *The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) Regulatory Innovations Workshop* yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 22 Januari 2025. *Workshop* ini menjadi forum penting bagi para regulator dan pemangku kepentingan global untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam percepatan regulasi serta penguatan manufaktur dalam menghadapi ancaman epidemik.



Gambar 29. Pelaksanaan *The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) Regulatory Innovations Workshop* di Singapura, 22 Januari 2025



Kepala Badan POM berkesempatan memimpin diskusi pada sesi bertajuk “*Expediting Regulatory Approvals and Supporting Manufacture*”. Dalam sesi tersebut, beliau menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai upaya strategis dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin kompleks dan tidak terduga.

Dalam paparannya, Kepala Badan POM menyampaikan bahwa Indonesia aktif mendorong kerja sama antara akademisi, pelaku industri, dan pemerintah melalui skema *Academic, Business, and Government* (ABG). Skema ini bertujuan menyeimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri, serta menjamin ketersediaan produk kesehatan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Kepala Badan POM juga menegaskan bahwa strategi kolaboratif Indonesia sejalan dengan pendekatan CEPI yang sejak 2017 menggandeng berbagai negara, lembaga riset, dan sektor swasta untuk mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin dan solusi kesehatan lainnya secara global.

Kehadiran Badan POM dalam *workshop* ini menegaskan posisi strategis lembaga sebagai otoritas regulasi yang proaktif dalam kerja sama internasional, terutama dalam pengawasan obat dan vaksin. Badan POM menjalankan pengawasan ketat terhadap produk kesehatan di Indonesia, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Selain itu, Badan POM turut mendorong industri farmasi nasional untuk mengembangkan produk-produk inovatif, khususnya vaksin.

Sistem regulasi Badan POM yang kokoh dan kredibel diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang pada tahun 2018 menetapkan Badan POM pada tingkat *maturity* level 3 dalam sistem regulasi vaksin. Hal ini mencerminkan bahwa sistem regulasi di Indonesia telah berfungsi dengan baik dan terintegrasi.

#### **b. Sinergi Badan POM dan Badan Gizi Nasional Wujudkan Generasi Sehat, Cerdas, dan Berkualitas Menuju Indonesia Emas**

Kepala Badan POM Taruna Ikrar bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menandatangani Nota Kesepahaman terkait Sinergitas Program Makan Bergizi Gratis pada tanggal 23 Januari 2025 di kantor Badan POM. Penandatanganan ini menandai komitmen kedua lembaga untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045

Kepala Badan POM menyatakan bahwa MBG merupakan investasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa. “Kita wajib mendukung gerakan MBG. Segala apapun, tanpa alasan, BPOM menjadi pendukung utama MBG,” tegasnya. Komitmen tersebut berakar pada urgensi pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat bagi seluruh anak Indonesia.



Gambar 30. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan BGN

Badan POM melalui unit pelaksana teknis di daerah akan mengawasi keamanan pangan MBG sepanjang rantai penyediaannya, mulai dari proses produksi, hingga distribusi kepada masyarakat. Nota kesepahaman ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyediaan pangan bergizi, serta pendampingan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dengan adanya nota kesepahaman ini, Badan POM dan BGN berharap dapat menyusun langkah-langkah strategis bersama dalam mengawal pelaksanaan program MBG. Kerja sama ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, dengan menghasilkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas.

#### c. Badan POM dan Kementerian Pertanian Bersinergi Tingkatkan Keamanan dan Daya Saing Produk Pertanian

Kepala Badan POM Taruna Ikrar menandatangani Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada tanggal 26 Maret 2025. MoU yang ditandatangani menyangkut kerja sama pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu, gizi, dan daya saing produk pertanian. Produk pertanian yang dimaksud adalah semua hasil yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem yang masih segar atau telah diolah.





Gambar 31. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan Kementerian Pertanian

Kepala Badan POM menjelaskan bahwa dalam MoU yang ditandatangani pada hari ini terdapat beberapa poin tujuan, di samping meningkatkan keamanan, mutu, gizi, dan daya saing pangan yang berasal dari produk pertanian. Disampaikan bahwa tujuan lain dari MoU ini adalah untuk menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik kerja sama ini. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi dengan BPOM merupakan peluang besar bagi seluruh masyarakat. “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu 1 desa 1 koperasi. Di dalam koperasi tersebut dicanangkan akan terdapat apotek, maka dari itu, kami membutuhkan sinergisme dan sosialisasi regulasi, kebijakan, dan standar pengawasan Badan POM dalam menjamin pangan bergizi, obat herbal berstandar, dan juga kosmetik aman yang beredar di masyarakat,” harapnya.

“Kami mengapresiasi Badan POM yang telah gencar menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam menghentikan praktik dan peredaran kosmetik ilegal. Selain itu, kami juga siap mendukung Badan POM dalam mengawasi perkembangan produksi obat herbal dalam negeri yang berdaya saing dan dapat dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang lebih murah, serta terjamin mutu dan khasiatnya untuk meningkatkan perekonomian,” tambah Andi Amran Sulaiman.

# BAB 11

## Sumber Daya Manusia

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, total pegawai di Badan POM sebanyak 5.320 pegawai dengan penempatan di Pusat sejumlah 1.750 pegawai dan di UPT sejumlah 3.570 pegawai. Demografi pegawai di Badan POM berdasarkan gender terdiri dari 1.508 orang (28,35%) laki-laki dan 3.812 orang (71,65%) perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 45,24% pegawai adalah lulusan S1, 26,70% pegawai lulusan Profesi, 14,39% pegawai lulusan S2, 0,40% lulusan S3 dan sisanya 13,28% lulusan SD/SLTP/SLTA/Diploma.





# BAB 12

## Realisasi Anggaran Sampai dengan Maret 2025

Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.354.321.946.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 42 Balai Besar/Balai POM dan 31 Loka POM. Realisasi anggaran per Maret tahun 2025 sebesar, Rp483.927.544.170 (20,55%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp176.701.215.541 realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp272.133.329.644, dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp35.092.998.985.

Tabel 3. Realisasi Anggaran s.d Maret 2025

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
<b>Pusat</b>	1.145.888.698.000	209.311.228.482	18,27%
<b>Balai Besar/ Balai POM</b>	1.304.662.733.000	123.640.250.432	9,48%
<b>Loka POM</b>	110.384.312.000	13.062.463.471	11,83%
<b>Total</b>	2.560.935.743.000	346.013.942.385	13,51%

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
<b>Pagu</b>	811.890.896.000	1.192.874.654.000	556.170.193.000	2.560.935.743.000
<b>Realisasi</b>	241.095.697.112	92.575.510.823	12.342.734.450	346.013.942.385
<b>%</b>	29,70%	7,76%	2,22%	13,51%



# BAB 13

## Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2025. Pemantauan ini mencakup perkembangan realisasi anggaran serta pencapaian sasaran kegiatan dan program, yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pemantauan juga bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini berbagai kendala yang dihadapi serta menetapkan upaya tindak lanjut yang diperlukan.

Pemantauan capaian RKP dilaksanakan secara bulanan. Adapun hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan **Triwulan I Tahun 2025** disajikan dalam dokumen ini.



## Penutup

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini merupakan sebagian dari keseluruhan kinerja BPOM. Meskipun demikian, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama tahun 2025, yaitu *melindungi kesehatan masyarakat Indonesia* melalui jaminan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPOM akan terus berupaya meningkatkan kinerjanya di masa mendatang dengan menjunjung tinggi integritas, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang menyeluruh (termasuk penganggaran), pelaksanaan yang terukur, evaluasi dan analisis hasil yang objektif, serta penerapan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).





# LAMPIRAN 1





## MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
	<b>BPOM</b>					
		Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72.50	Persen	85.80	118.34%
		Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78.00	Persen	93.86	120.33%
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75.00	Persen	81.13	108.17%
		Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88.50	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50.98	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82.50	Indeks	Akhir tahun	-
		Persentase pemenuhan Grand design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41.30	Persen	Triwulan II	-
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	88.20	Indeks	Akhir tahun	-
		Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	71.30	Persen	Akhir tahun	-
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	64.00	Persen	Triwulan II	-



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (produsen non UMKM)	34.75	Persen	Akhir tahun	-
		Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.40	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik BPOM	4.35	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks RB BPOM	90.05	Indeks	Akhir tahun	-
<b>A.</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>					
		Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50.98	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.40	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82.50	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	88.20	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88.50	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik BPOM	4.35	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks RB BPOM	90.05	Indeks	Akhir tahun	-
		Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	71.30	Persen	Akhir tahun	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78.00	Persen	93.86	120.33%
		Persentase pemenuhan Grand design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41.30	Persen	Akhir tahun	-
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75.00	Persen	81.13	108.17%
		Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72.50	Persen	85.80	118.34%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	64.00	Persen	Akhir tahun	-
		Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (produsen non UMKM)	34.75	Persen	Akhir tahun	-
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82.50	Indeks	Akhir tahun	-
		Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	75.00	Persen	Akhir tahun	-
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	51.00	Persen	45.00	88.24%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60.00	Persen	Akhir tahun	-
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	68.00	Persen	Akhir tahun	-
		Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52.00	Persen	Akhir tahun	-



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12.00	Persen	Akhir tahun	-
		Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56.00	Persen	Akhir tahun	-
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19.00	Persen	Akhir tahun	-
		Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.00	Persen	34.64	46.81%
		Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75.00	Persen	50.57	67.43%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69	Indeks	Akhir tahun	-
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.81	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik UPT	4.27	Indeks	Akhir tahun	-
		Jumlah desa pangan aman	172	Jumlah	9,21% (Progress)	"9,21% (Progress)"
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	73	Jumlah	9,28% (Progress)	"9,28% (Progress)"

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	490	Jumlah	9,50% (Progress)	"9,50% (Progress)"
		Nilai AKIP UPT BPOM	79.30	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.01	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	60.70	Nilai	36.78	60.60%
		Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59.00	%	15.09	25.58%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.07	%	62.57	67.23%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	%	0.23	0.90%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.46	%	98.65	114.10%
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100.00	%	25.49	25.49%
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85.13	%	22.53	26.47%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.29	%	66.46	79.79%
		Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	%	47.04	52.27%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100.00	%	35.35	35.35%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	%	26.42	26.42%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78.62	%	95.08	120.93%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.91	%	86.15	105.17%
		Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.22	%	92.90	111.63%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.63	%	92.35	114.54%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.72	%	60.15	72.72%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.62	%	44.75	49.39%
		Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.00	%	21,28% (Progres)	"21,28% (Progres)"
		Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.52	%	87.33	100.93%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100.00	Persen	87.67	87.67%
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	3.01	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	89.00	Nilai	Akhir tahun	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Tervalidasi	91.00	%	85.43	93.88%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar	100.00	%	36.00	36.00%
		Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	62.00	%	Akhir tahun	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	100.00	%	100.00	100.00%
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	3.01	Indeks	Akhir tahun	-
		Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpetakan	4.00	Jumlah	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85.00	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai standar	100.00	%	36.00	36.00%
		Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti	75.00	%	66.67	88.89%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	100.00	%	90.00	90.00%
1.4	Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3.01	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks pelayanan publik (IPP) dit Pengawasan OT dan SK	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengembangan produk Fitofarmaka yang berdaya saing	9.00	Jumlah	Akhir tahun	-



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90.01	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	89.50	Nilai	84.78	94.73%
		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	91.50	Nilai	88.85	97.10%
		Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu	11.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	98.50	%	99.32	100.83%
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76.00	%	82.43	108.46%
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	96.00	%	100.00	104.17%
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92.00	%	96.23	104.60%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	75.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	80.00	%	Akhir tahun	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	85.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	93.00	%	93.31	100.33%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100.00	%	36.00	36.00%
		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83.00	%	84.13	101.36%
		Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	60.00	%	Akhir tahun	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100.00	%	75.00	75.00%
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	3.20	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4.65	Indeks	Akhir tahun	-
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	185.00	Jumlah	Akhir tahun	-
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Terhadap Pengawasan Sarana IRTP	2.00	Jumlah	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	91.82	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69.00	%	Akhir tahun	-



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase Keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	97.00	%	100.00	103.09%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	100.00	%	36.36	36.36%
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi	11.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan wajib Program Manajemen Risiko	75.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19.00	%	Akhir tahun	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	100.00	%	75.00	75.00%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Kosmetik	3.00	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks pelayanan publik (IPP) dit Pengawasan Kosmetik	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Kosmetik	92.19	Indeks	Akhir tahun	-
		Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90.00	%	100.00	111.11%
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90.00	%	95.86	106.51%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	92.00	%	91.25	99.18%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84.00	%	93.33	111.11%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84.00	%	90.00	107.14%
		Persentase keputusan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94.20	%	94.51	100.33%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Kosmetik	100.00	%	36.36	36.36%
		Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi	70.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83.85	%	Akhir tahun	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100.00	%	75.00	75.00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	3.60	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	93.37	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan penyerahan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	84.00	%	Akhir tahun	-



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan sesuai standar	96.00	%	93.33	97.22%
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan penyerahan obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	88.00	%	85.14	96.75%
		Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	96.50	%	96.49	99.99%
		Persentase kesesuaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR	80.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	100.00	%	36.36	36.36%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan distribusi obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	30.00	%	Akhir tahun	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	100.00	%	95.00	95.00%
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	3.83	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Jumlah tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan	12.00	Jumlah	4.00	33.33%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	93.80	Nilai	Akhir tahun	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase hasil pengawasan keamanan, mutu, dan informasi Obat dan NAPPZA oleh UPT BPOM yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	85.00	%	56.67	66.67%
		Persentase hasil pengawasan mutu ONPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	70.00	%	86.96	124.23%
		Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	75.00	%	79.70	106.27%
		Persentase laporan pengawasan iklan dan penandaan obat NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	89.40	%	76.28	85.32%
		Persentase materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan sesuai rencana aksi	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase pelaku usaha produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang melaporkan informasi produk sesuai ketentuan	57.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	100.00	%	36.36	36.36%
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	78.00	%	88.33	113.24%
		Persentase Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat serta Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu	94.00	%	93.40	99.36%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	100.00	%	90.00	90.00%
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3.60	%	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4.70	%	Akhir tahun	-



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Jumlah Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/ Kota Pangan Aman	170.00	Jumlah	Akhir tahun	-
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Terhadap Pengawasan PIRT	2.00	Jumlah	Akhir tahun	-
		Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Peredaran	200.00	Jumlah	89.00	44.50%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86.75	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase hasil pengawasan produk dan sarana peredaran pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase Keputusan hasil pengawasan pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	99.88	%	100.00	100.12%
		Persentase Keputusan hasil pengawasan sarana peredaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase KLB Keracunan Pangan yang teridentifikasi penyebabnya	75.00	%	71.43	95.24%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sesuai standar	100.00	%	36.00	36.00%
		Persentase Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan tepat waktu	93.00	%	95.81	103.02%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Pangan Olahan Sesuai Ketentuan	72.00	%	72.28	100.39%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	100.00	%	75.00	75.00%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	3.52	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	93.45	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar	82.00	%	12.57	15.33%
		Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi Obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	85.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	86.00	%	85.19	99.06%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	100.00	%	36.36	36.36%
		Persentase Penilaian Hasil Pengawasan Kemandirian UPT Baru	75.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	78.00	%	100.00	128.21%
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	84.00	%	62.50	74.40%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	100.00	%	75.00	75.00%
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4.00	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Pangan Olahan	96.60	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	79.00	%	51.55	65.25%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai standar	100.00	%	36.36	36.36%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	100.00	%	Akhir tahun	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	100.00	%	75.00	75.00%
1.12	Registrasi Obat	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat	3.00	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat	91.50	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan	75.00	%	84.35	112.47%
		Persentase obat yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	75.00	%	84.07	112.09%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat sesuai standar	100.00	%	42.86	42.86%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase pengawalan hilirisasi obat pengembangan baru melalui registrasi yang dikawal sesuai standar	70.00	%	85.00	121.43%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Obat	100.00	%	95.00	95.00%
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3.01	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.50	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam	90.00	%	90.00	100.00%
		Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	50.00	%	27.48	54.96%
		Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	94.00	%	80.18	85.30%
		Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	75.00	%	67.14	89.52%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100.00	%	36.00	36.00%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif	88.00	%	93.37	106.10%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase peningkatan jumlah varian produk Jamu yang terdaftar	20.00	%	4.68	23.40%
		Persentase peningkatan penelitian uji pra klinik dan uji klinik Jamu yang didampingi sesuai standar	18.00	%	4.17	23.17%
		Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	65.00	%	67.08	103.20%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100.00	%	80.00	80.00%
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	83.00	Nilai	Akhir tahun	-
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	2.90	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Jumlah Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting	1.00	Jumlah	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	89.00	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100.00	%	36.00	36.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100.00	%	100.00	100.00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86.43	Nilai	Akhir tahun	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3.20	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1.00	Jumlah	Akhir tahun	-
		Jumlah regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan	1.00	Jumlah	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	90.08	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	88.00	%	15.00	17.05%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai standar	100.00	%	36.36	36.36%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100.00	%	75.00	75.00%
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	88.05	Nilai	Akhir tahun	-
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3.43	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	4.60	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	92.38	Nilai	Akhir tahun	-



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	100.00	%	36.36	36.36%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	100.00	%	92.00	92.00%
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3.60	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat PMPUPO	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	73.00	Jumlah	7.00	9.59%
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar	28.00	Jumlah	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92.30	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	74.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	80.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	88.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar	100.00	%	36.00	36.00%
		Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan	86.42	%	Akhir tahun	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100.00	%	75.00	75.00%
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko PPOMN	3.15	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik PPOMN	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar	4.00	Jumlah	Akhir tahun	-
		Nilai AKIP PPOMN	85.00	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	77.00	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	5.00	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI PPOMN	91.59	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	65.50	Nilai	64.10	97.86%
		Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	30.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80.91	%	76.89	95.03%
		Persentase pemenuhan laboratorium hijau	40.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu	42.00	%	Akhir tahun	-



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Presentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80.04	%	75.51	94.34%
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan	2.80	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan	87.44	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	59.00	%	43.64	73.97%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Sesuai Standar	100.00	%	36.00	36.00%
		Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	55.00	%	Akhir tahun	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan	100.00	%	75.00	75.00%
1.20	Analisis Kebijakan di bidang Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3.01	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86.50	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82.00	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5.00	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	87.00	%	Akhir tahun	-
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	91.00	%	94.38	103.71%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Manajemen Risiko Direktorat PMPU OT, SK, Kos	2.85	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat PMPU OT,SK,Kos	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat PMPU OT, SK, Kos	87.10	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	70.00	%	3.57	5.10%
		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	2.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	65.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat PMPU OT, SK, Kos	100.00	%	36.00	36.00%
		Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	92.00	%	6.50	7.07%
		Tingkat efektivitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89.34	%	85.06	95.21%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat PMPU OT, SK, Kos	100.00	%	75.00	75.00%
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan	3.01	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Siber Obat dan Makanan	82.50	Nilai	Akhir tahun	-



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	82.00	%	79.28	96.68%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan	100.00	%	36.36	36.36%
		Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	87.00	%	85.04	97.75%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	100.00	%	75.00	75.00%
<b>B.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
		Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2.91	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Opini Publik	78.00	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	34.60	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5.00	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	86.62	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	83.81	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase Kerja Sama yang Efektif	90.50	%	20.93	23.13%
		Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	61.00	%	Akhir tahun	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Indeks Kepuasan Media	78.40	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Manajemen Risiko Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	2.92	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Opini Publik	85.20	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	81.00	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase Kerja Sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti	20.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.50	%	20.62	22.78%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai standar	100.00	%	36.00	36.00%
		Persentase peran aktif BPOM dalam kerja sama Internasional di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	90.50	%	21.23	23.46%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	100.00	%	95.00	95.00%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan	3.60	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Perencanaan Pembangunan	97.55	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja	61.70	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM	90.00	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM	96.40	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan	88.32	Nilai	Akhir tahun	-
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4.00	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase dokumen manajemen risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar	100.00	%	25.00	25.00%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100.00	%	20.00	20.00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar	100.00	%	36.40	36.40%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100.00	%	100.00	100.00%
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	92.75	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	3.20	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	4.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Reformasi Hukum	100.00	Indeks	Akhir tahun	-
		Jumlah Dokumen Penataan organisasi yang dihasilkan	4.00	Jumlah	Akhir tahun	-
		Jumlah Kebijakan Reformasi birokrasi yang ditetapkan	2.00	Jumlah	Akhir tahun	-
		Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi	92.50	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4.22	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.70	%	Akhir tahun	-
		Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar	100.00	%	36.00	36.00%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi	100.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman	55.00	%	Akhir tahun	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organsiasi	100.00	%	100.00	100.00%
		Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik	94.15	%	Akhir tahun	-
		Tingkat Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4.00	Nilai	Akhir tahun	-
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Indeks Kesejahteraan Pegawai	3.33	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Manajemen Risiko Biro SDM	3.70	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks NSPK Manajemen ASN	93.50	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Sistem Merit	0.97	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Biro SDM	87.76	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro SDM sesuai standar	100.00	%	36.00	36.00%
		Persentase SDM BPOM yang Dikembangkan Kariernya Sesuai Ketentuan	90.00	%	Akhir tahun	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase SDM BPOM Yang Terpetakan Sebagai Suksesor	100.00	%	Akhir tahun	-
		Persentase Talenta BPOM yang Dikembangkan Kariernya Melalui Talent Mobility Internal dan Eksternal	20.00	%	Akhir tahun	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100.00	%	88.00	88.00%
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Indeks BerAKHLAK	65.00	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Manajemen Risiko PPSDM	3.05	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pelayanan Publik PPSDM POM	4.05	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai AKIP PPSDM	80.15	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM	5.00	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI PPSDM	88.50	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya sesuai dengan perencanaan	70.00	%	15.54	22.20%
		Persentase SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Memenuhi Standar Kompetensi	88.00	%	81.86	93.02%
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94	Indeks	Akhir tahun	-



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.80	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Indeks SPBE	4.59	Nilai	4.53	98.69%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97.47	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20.00	%	Akhir tahun	-
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88.48	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3.60	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.73	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.90	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.20	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	89.12	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84.60	Nilai	Akhir tahun	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73.70	%	Akhir tahun	-
		Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat I yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100.00	%	27.27	27.27%
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100.00	%	66.67	66.67%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.18	%	Akhir tahun	-
		Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	93.57	%	94.49	100.98%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100.00	%	100.00	100.00%
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88.33	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3.20	Indeks	Akhir tahun	-
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.73	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.90	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.20	Nilai	Akhir tahun	-



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	86.08	Nilai	Akhir tahun	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84.60	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73.70	%	Akhir tahun	-
		Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100.00	%	27.27	27.27%
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100.00	%	33.33	33.33%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.18	%	Akhir tahun	-
		Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	93.26	%	88.60	95.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100.00	%	95.00	95.00%
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Indeks Manajemen Risiko Biro Umum	2.65	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Pengelolaan Aset	3.31	Indeks	Akhir tahun	-
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	88.30	Indeks	Akhir tahun	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Nilai Pembangunan ZI Biro Umum	83.50	Nilai	Akhir tahun	-
		Persentase Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan	94.10	%	96.00	102.02%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Umum sesuai Standar	100.00	%	36.00	36.00%
		Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai perencanaan	100.00	%	33.00	33.00%
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	62.00	%	Akhir tahun	-
		Tingkat Digitalisasi Arsip	98.28	%	Akhir tahun	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100.00	%	100.00	100.00%





## LAMPIRAN 2



## Peringkat Realisasi Anggaran Unit Pusat

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	10.410.240.000	2.179.343.000	759.253.639	7,29%	34,84%
2	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	508.433.561.000	500.833.243.000	161.418.837.562	31,75%	32,23%
3	BIRO KERJASAMA	11.408.245.000	2.135.790.000	597.440.193	5,24%	27,97%
4	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	14.786.465.000	2.996.631.000	796.333.604	5,39%	26,57%
5	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	6.621.582.000	1.920.925.000	489.699.608	7,40%	25,49%
6	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	16.001.858.000	2.700.000.000	685.897.973	4,29%	25,40%
7	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	9.794.120.000	2.545.221.000	630.210.687	6,43%	24,76%
8	BIRO UMUM	134.445.586.000	79.935.537.000	19.753.150.108		24,71%
9	INSPEKTORAT I	14.194.827.000	8.657.245.000	2.129.524.377	14,69%	24,60%
10	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	6.725.908.000	1.348.878.000	319.701.315	15,00%	23,70%
11	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	34.806.605.000	10.515.616.000	2.384.037.557	4,75%	22,67%
12	INSPEKTORAT II	5.453.149.000	1.061.223.000	229.198.831	6,85%	21,60%
13	BALAI PENGUJIAN PRODUK BIOLOGI	6.892.255.000	3.735.324.000	775.511.365	4,20%	20,76%
14	BALAI KALIBRASI	5.150.520.000	2.697.159.000	541.814.859	11,25%	20,09%
15	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN. DAN KOSMETIK	11.425.748.000	4.001.546.000	790.384.169	6,92%	19,75%
16	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	44.521.934.000	27.469.122.000	5.418.120.914	12,17%	19,72%
17	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	12.859.156.000	4.952.858.000	955.653.438	7,43%	19,29%
18	DIT. REGISTRASI OBAT	12.804.921.000	3.065.945.000	487.225.934	3,80%	15,89%
19	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	8.538.356.000	2.700.000.000	401.403.962	4,70%	14,87%



No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
20	DIT. CEGAH TANGKAL	9.321.075.000	1.905.519.000	256.281.814	2,75%	13,45%
21	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	105.800.044.000	39.958.231.000	5.335.575.876	5,04%	13,35%
22	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	10.850.770.000	2.744.419.000	341.496.831	3,15%	12,44%
23	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	14.628.747.000	3.797.829.000	383.995.140	2,62%	10,11%
24	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN. MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA. PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	12.290.695.000	2.903.165.000	289.779.612	2,36%	9,98%
25	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	20.041.240.000	4.893.435.000	421.859.640	2,10%	8,62%
26	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	7.174.431.000	2.193.150.000	186.229.732	2,60%	8,49%
27	DIT. PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN	14.078.148.000	3.597.319.000	268.709.766	1,91%	7,47%
28	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	5.100.007.000	4.000.000.000	292.658.127	5,74%	7,32%
29	BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN	15.176.855.000	10.279.228.000	708.087.447	4,67%	6,89%
30	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN	17.367.797.000	4.961.317.000	306.016.817	1,76%	6,17%
31	DIT. STANDARDISASI OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA. PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	8.294.694.000	3.265.013.000	166.617.270	2,01%	5,10%
32	DIT. STANDARDISASI PANGAN OLAHAN	6.058.727.000	2.624.866.000	93.628.620	1,55%	3,57%
33	DIT. SIBER OBAT DAN MAKANAN	24.430.432.000	20.047.644.000	696.914.671	2,85%	3,48%

## Peringkat Realisasi Anggaran Balai Besar/Balai Pom

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	672844   BALAI POM DI BANYUMAS	8.033.570.000	3.085.781.000	1.080.450.661	13,45%	35,01%
2	690470   BALAI POM DI TABALONG	3.583.112.000	2.377.154.000	806.647.825	22,51%	33,93%
3	432954   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	28.351.883.000	17.512.846.000	5.810.191.631	20,49%	33,18%
4	690464   BALAI POM DI TANJUNGBALAI	3.609.700.000	2.209.288.000	710.187.655	19,67%	32,15%
5	672845   BALAI POM DI PALOPO	6.756.241.000	4.552.968.000	1.451.859.586	21,49%	31,89%
6	672838   BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	21.781.026.000	14.537.113.000	4.570.693.426	20,98%	31,44%
7	432960   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	20.815.994.000	14.236.747.000	4.307.855.209	20,69%	30,26%
8	672849   BALAI POM DI DUMAI	15.810.463.000	3.079.119.000	911.646.904	5,77%	29,61%
9	690467   BALAI POM DI TULANG BAWANG	4.414.617.000	2.117.557.000	581.494.471	13,17%	27,46%
10	672840   BALAI POM DI TASIKMALAYA	36.430.090.000	4.956.447.000	1.313.449.412	3,61%	26,50%
11	690484   BALAI POM DI INDRAGIRI HULU	15.521.856.000	2.521.482.000	648.973.369	4,18%	25,74%
12	690475   BALAI POM DI BIMA	3.809.763.000	2.110.209.000	534.406.274	14,03%	25,32%
13	432932   BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	23.993.072.000	12.709.925.000	3.113.525.410	12,98%	24,50%
14	672850   BALAI POM DI BAU-BAU	4.608.538.000	2.879.376.000	700.717.252	15,20%	24,34%
15	690471   BALAI POM DI BALIKPAPAN	4.956.412.000	2.501.802.000	605.185.332	12,21%	24,19%
16	432790   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	20.322.623.000	13.185.361.000	3.180.894.861	15,65%	24,12%
17	690468   BALAI POM DI SANGGAU	4.148.145.000	2.401.576.000	575.685.619	13,88%	23,97%
18	672859   BALAI BESAR POM DI GORONTALO	14.628.300.000	8.258.944.000	1.946.785.622	13,31%	23,57%
19	672839   BALAI POM DI SURAKARTA	8.008.888.000	4.478.637.000	1.053.660.223	13,16%	23,53%
20	672841   BALAI POM DI KEDIRI	24.253.063.000	8.311.622.000	1.718.774.217	7,09%	20,68%



NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
21	432841   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	29.738.436.000	16.796.488.000	3.438.651.277	11,56%	20,47%
22	672846   BALAI POM DI BOGOR	9.854.603.000	8.181.254.000	1.641.520.442	16,66%	20,06%
23	672848   BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	13.591.640.000	6.129.078.000	1.203.528.386	8,85%	19,64%
24	419508   BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	11.678.251.000	7.228.686.000	1.417.237.316	12,14%	19,61%
25	432923   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	72.075.284.000	21.576.818.000	4.173.367.063	5,79%	19,34%
26	432762   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	53.902.531.000	25.492.585.000	4.917.873.853	9,12%	19,29%
27	432747   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	45.651.891.000	25.162.060.000	4.795.042.166	10,50%	19,06%
28	432991   BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	26.079.443.000	13.534.489.000	2.569.300.520	9,85%	18,98%
29	672843   BALAI POM DI JEMBER	7.689.766.000	5.352.446.000	1.012.732.329	13,17%	18,92%
30	432872   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	22.128.308.000	14.035.291.000	2.625.820.346	11,87%	18,71%
31	672821   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	29.078.945.000	17.848.181.000	3.256.600.782	11,20%	18,25%
32	432784   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	65.046.406.000	31.653.269.000	5.649.443.244	8,69%	17,85%
33	432778   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	33.108.072.000	19.646.233.000	3.495.800.541	10,56%	17,79%
34	432881   BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	24.456.634.000	15.539.799.000	2.634.081.805	10,77%	16,95%
35	432804   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	49.118.801.000	23.306.868.000	3.783.452.039	7,70%	16,23%
36	432850   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	32.249.036.000	18.601.640.000	2.968.267.402	9,20%	15,96%
37	672847   BALAI POM DI TANGERANG	11.260.846.000	8.211.887.000	1.302.072.044	11,56%	15,86%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
38	432810   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	36.739.481.000	19.633.085.000	3.111.535.219	8,47%	15,85%
39	432917   BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	22.472.137.000	14.863.227.000	2.300.447.724	10,24%	15,48%
40	432753   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	66.390.943.000	31.230.862.000	4.690.577.918	7,07%	15,02%
41	432835   BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	37.377.367.000	14.958.253.000	2.236.348.793	5,98%	14,95%
42	432901   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	35.802.820.000	23.188.080.000	3.464.948.139	9,68%	14,94%
43	432979   BALAI BESAR POM DI KUPANG	32.161.658.000	16.122.340.000	2.368.141.152	7,36%	14,69%
44	432829   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	37.264.544.000	24.784.251.000	3.560.394.099	9,55%	14,37%
45	689071   BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	28.846.708.000	12.556.992.000	1.791.432.374	6,21%	14,27%
46	432948   BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	26.128.121.000	15.217.830.000	2.132.307.198	<b>8,16%</b>	14,01%
47	419578   BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	18.801.278.000	9.738.647.000	1.356.098.949	7,21%	13,92%
48	432866   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	29.962.179.000	18.840.824.000	2.390.721.406	7,98%	12,69%
49	690465   BALAI POM DI PAYAKUMBUH	27.338.900.000	5.854.080.000	736.876.873	2,70%	12,59%
50	432985   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	30.031.929.000	18.459.897.000	2.219.737.312	7,39%	12,02%
51	432897   BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	31.276.628.000	21.759.883.000	2.609.425.840	8,34%	11,99%
52	672842   BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	21.577.684.000	13.812.544.000	1.576.682.679	7,31%	11,41%
53	672853   BALAI POM DI ENDE	11.944.107.000	7.677.232.000	586.911.875	4,91%	7,64%



## Peringkat Realisasi Anggaran Loka Pom

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	690923   LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO	3.602.436.000	2.277.256.000	813.884.314	22,59%	35,74%
2	690473   LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	3.380.807.000	2.014.780.000	687.558.621	20,34%	34,13%
3	690480   LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	8.807.236.000	2.873.748.000	960.755.727	10,91%	33,43%
4	690483   LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG	3.062.441.000	1.822.058.000	602.259.074	19,67%	33,05%
5	690482   LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	3.584.118.000	2.326.656.000	759.667.596	21,20%	32,65%
6	672852   LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	4.261.865.000	2.499.935.000	802.521.637	18,83%	27,51%
7	690462   LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	3.549.671.000	2.008.711.000	612.725.718	32,10%	26,57%
8	672851   LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	3.620.893.000	2.318.863.000	704.780.728	17,26%	30,50%
9	690485   LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU	4.330.269.000	2.537.804.000	765.601.492	19,46%	30,39%
10	690474   LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG	3.798.317.000	2.323.688.000	692.229.109	17,68%	30,17%
11	690478   LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	3.597.820.000	2.008.246.000	587.511.569	18,22%	29,79%
12	690469   LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	3.453.941.000	2.101.947.000	610.366.158	16,33%	29,25%
13	690479   LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	3.471.918.000	2.150.227.000	585.775.617	16,87%	27,24%
14	690486   LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	3.732.622.000	1.975.681.000	518.861.198	13,90%	26,26%
15	690481   LOKA POM DI ACEH SELATAN	3.479.978.000	2.043.213.000	515.750.241	14,82%	25,24%
16	690472   LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	3.733.890.000	2.117.919.000	527.791.640	14,14%	24,92%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
17	690477   LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	21.277.069.000	3.034.154.000	732.028.632	3,44%	24,13%
18	672854   LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	12.282.785.000	2.530.311.000	574.208.549	4,67%	22,69%
19	22,69%	3.927.558.000	2.313.586.000	491.674.000	12,52%	21,25%
20	690476   LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	9.428.678.000	2.749.010.000	516.511.851	5,48%	18,79%





Jln. Percetakan Negara Jakarta Pusat  
10560



[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)



@bpom\_ri



021 4244691



[halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id)



Bpom RI

